

Analisis hubungan kerjasama antara pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan pemerintah Kota Bekasi: studi kasus TPA Bantar Gebang Bekasi = Analysis of the cooperative relationship between the Jakarta Special Capital Region government and the Bekasi City government: a case study of the Bantar Gebang TPA Bekasi

Patar Surungan parulian Pardede, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=96241&lokasi=lokal>

Abstrak

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Propinsi dan Ibukota Negara memiliki beban dalam peugadaan TPA di luar Kota Jakarta. Sebagai pemecahan dilakukan kCIj8S3!II8 TPA Bantar Gebang BekasigKeIjasama TPA

tersebut sudah berlangsung lama dan akhir-akhir menemui permasalahan ditinjau dad aspek substansi dan kebijakan keljasmzg aspek pelaksanaan dan kognitiil aspek pembiayaan dan sosial kC1j3.S8IIIa. Semua pennasalahan utamanya dipengaruhi pembahan sistem pcmerintahan daerah, sehingga ada kesenjangan antara existing condition dan expected condition keljasama di atas. _

Untuk dapat memecahkan masalah kesenjangan tersebut diglmakan metode peneltijan deskriptif kualitatif. Dali hasil peneli lian ditemukan antara lain ; kexjasarna antara Pcmerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan

Pcmcrintah Daerah Tingkat II Bekasi (Pemerintah Kota Bekasi) tidak pemah teriadid dan kebijakan kerjasama masa itu lebih sentralistjtk, juga koordinasi tidak pemah teljadi karena hambatan hirarlcid dan lebih bersifat teritolial. Temuan lain yalmi, transfer of knowledge sebagai manfaat kognitif tidak pernah terjadi. Pemcrintah Dacrah Tingkat I Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah Tingkat H Bekasi tidak pcmah memberikan kontribusi pembiayaan dalam kenjasama. Selain im, Pemcrintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta kurang disiplin dalam penerapan sistem sanitary landfill.

Sebagai kegiatan akhir penelitian ini, disarankan bebcrapa tindakan konkrit untuk dilaksauakan yakni : Pcmerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemcrintah Kota Bekasi membuat peljanjian kerjasama dalam bentuk Keputusan Bersama dan ditindaldanjuti dengan Keputusan Bersama oleh Dinas/Lembaga Otonom masing-masing. Unluk pelaksanaan kerjasama sebagai saran agar dilakukan koordinasi secara intens di tingkat organjsasi dan di tingkat telcnis/operasional. Koordinasi teritorial, instansional, fungsional dan waktu agar dilakukan secara bcrsama-sama dan terpadu. Kemudian perlu mengikut sertakan Pemerintah Kota Bekasi dalam keljasama agar manfaat kognitif dapat tercapai. Akhimya disarankan Pcmelintah Kota Bekasi memberi kontribusi pembiayaan dan mengupayakan alternative pembiayaan dari sektor swasta.